Completeness of Teacher Administration in PKN Class VIII Student Learning MTs. Al Kautsar Ranggo Village, Pajo Subdistrict, Dompu District, 2019/2020 Academic Year

Kelengkapan Administrasi Guru dalam Pembelajaran PKN Siswa Kelas VIII MTs. Al Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun Pelajaran 2019/2020

Fitriani²

email: yanifitriani1979@gmail.com

Abstract: This study aims to find out 1). What is the completeness of the administration of teachers in learning Civics students of class VIII MTs. Al-Kautsar Ranggo Village 2019-2020 Academic Year, 2). How is the completeness of the administration of the teacher in class VIII student learning MTs. Al-Kautsar Ranggo Village 2019-2020 Academic Year. The research method used is field research, namely research that studies intensively about a person's background, social interaction, individuals, groups, institutions, and society. In this study, data collection was carried out using the method: Observation Method (Observation), Interview Method (Interview), and Documentation Method. Based on the results of the study obtained as follows 1). Teachers in teaching Citizenship Education class VIII MTs. Al-Kautsar Ranggo Village, Pajo Subdistrict, Dompu Regency has prepared teaching (administration) tools so that it is possible to fight in the teaching and learning process, 2). The role of teacher completeness in teaching MTs Citizenship Education. Al-Kautsar, Ranggo Village, Pajo Subdistrict, Dompu Regency really has an important role for teachers and students, so that output is better.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Apa saja kelengkapan administrasi guru di dalam pembelajaran PKn siswa kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Tahun Pelajaran 2019-2020, 2). Bagaimanakah kelengkapan administrasi guru dalam pembelajaran siswa kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Tahun Pelajaran 2019-2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan seseorang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode: Metode Observasi (Pengamatan), Metode Wawancara (*Interview*), dan Metode Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sebagai berikut 1). Para Guru

² Dosen Tetap pada Prodi Pend. Agama Islam pada STAI Al-Amin Dompu

dalam mengajar Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu telah menyiapkan perangkat (administrasi) pengajaran sehingga hal tersebut memungkinkan untuk berperang dalam proses belajar mengajar, 2). Peranan kelengkapan administrasi guru dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu benar-benar mempunyai peranan penting bagi guru dan siswa, sehingga output lebih baik.

Keywords: *Completeness, Teacher Administration, Learning.*

Kata Kunci: *Kelengkapan, Administrasi Guru, Pembelajaran.*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan dikenal istilah pendidikan sebagai sebuah system. Sebagai sebuah system, pendidikan terdiri dari sejumlah komponen. Komponen paling jelas dari pendidikan adalah lembaga sekolah. Lebih detail dapat dijelaskan bahwa sekolah merupakan satu contoh system pendidikan yang juga memiliki komponen-komponen tersendiri yang terbagi dalam beberapa bidang antara lain kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, bidang sarana dan prasarana yang bertugas menyediakan fasilitas belajar mengajar, bidang tenaga pengajar atau guru yang bertugas mengajarkan ilmunya kepada siswa, komponen siswa, bidang tata usaha yang mengurus segala macam urusan administrasi sekolah dan lain sebagainya.

Komponen-komponen di atas kemudian terhimpun secara terorganisir dan sistematis menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tujuan memberikan pendidikan bagi masyarakat. Masing-masing komponen idealnya harus bersifat professional, dalam artian semuanya bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan *job description* yang ada. Seorang guru harus konsisten mengajar pelajaran yang ditugaskan, petugas sarana dan prasarana harus senantiasa menyiapkan segala bentuk kebutuhan pengajaran, kepala sekolah juga selalu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan bidang tata usaha harus menyelesaikan semua urusan kelengkapan administrasi pembelajaran. Apabila salah satu komponen lalai atau ditinggalkan oleh penanggung jawabnya maka proses penyelenggaraan pembelajaran dapat menjadi kacau.

Kerap kali ditemukan di sekolah-sekolah, siswa menjadi terlantar karena guru yang mengajar tidak masuk sekolah. Guru juga menjadi masa mengajar tepat waktu gaji tidak lancar atau guru dan siswa kesulitan dalam melaksanakan aktifitas pembelajaran karena ruang kelas tidak memadai atau ruang kelas menjadi bocor karena hujan dan sebagainya. Akibatnya target kurikulum menjadi tidak tercapai. Padahal idealnya, masing-masing komponen satu sama lain saling berpengaruh, tetapi secara fungsi

komponen-komponen tersebut terarah pada satu pencapaian tujuan yaitu tujuan dari sistem. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masing-masing komponen memiliki kepentingan yang sama yaitu mewujudkan orientasi pendidikan yang membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya, (Umar T dan La Sula, 2001:1).

Dalam mengajarkan pendidikan kewarganegaraan juga sering terjadi persoalan dimana seorang guru kesulitan mengajarkan pendidikan kewarganegaraan sesuai kurikulum karena secara administrasi sekolah tidak menyediakan fasilitas pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan seperti tidak adanya buku pegangan guru secara jelas, kemudian pedoman kurikulum yang juga tidak disediakan di sekolah sehingga guru harus mencari kesan kemari atau membuat sendiri kurikulum tersebut. Persoalan seperti di atas kerap terjadi terutama di daerah-daerah pinggiran perkotaan atau di wilayah pedesaan (yang jauh dari jangkauan kelengkapan administrasi pembelajaran).

Ahmad Gozali menunjukkan kelemahan yang biasanya dirasakan sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya yaitu dalam bidang sarana dan prasarana, kurangnya tenaga guru baik dalam arti jumlah maupun mutunya, kurikulum dan sebagainya. Akan tetapi yang paling essensial namun jarang diperhatikan adalah bahwa kekurangan sekolah juga di bidang administrasi, (A.Gozali, 1993:9).

Pengaruh administrasi sekolah yang lemah dapat mengakibatkan tidak berhasilnya suatu usaha untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan pembelajaran, walaupun tersedia sarana dan prasarana, tenaga guru dan kurikulum yang memadai. Seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan baik keterampilan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis sehingga bidang administrasi sekolah harus menyediakan kelengkapan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menunjang guru Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. Hal ini penting agar seorang guru tetap bersemangat mengajarkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan nyaman. Sebaliknya apabila kebutuhan di atas tidak diperhatikan maka proses pembelajaran akan menjadi terhambat sehingga pada akhirnya tujuan pendidikan dan pengajaran kemampuan berbahasa tidak tercapai. Oleh sebab itu secara umum dapat dikatakan bahwa dengan kelengkapan administrasi sekolah yang baik walaupun dengan sarana dan prasarana, tenaga guru dan kurikulum yang masih belum memadai, namun dapat diharapkan bahwa kelengkapan administrasi sekolah tersebut akan mampu menunjang unsur-unsur penting dari sekolah tersebut dalam mencapai tujuan penyelenggaraan sekolah secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, (A.Gozali, 1993:9).

Maka dengan uraian di atas menjadi semakin jelas hubungan kelengkapan administrasi sekolah di satu sisi sebagai komponen tersendiri akan tetapi di sisi lain menjadi satu kesatuan dengan komponen sekolah yang lain yaitu dengan tenaga pengajar. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan maju, perkembangan sekolah-sekolah juga menyesuaikan diri. Ledakan laju pertumbuhan penduduk yang cepat

semakin menurut pemerintah memberikan saran pelayanan publik termasuk penyediaan sarana pendidikan yang memadai yaitu sekolah. Maka di setiap daerah terjadi perkembangan seolah-olah dengan cepat baik dalam artian kualitatif dan kuantitatif.

Secara kuantitatif, perkembangan jumlah sejumlah terus meningkat dengan cepat setiap tahunnya walaupun tetap belum mampu menampung seluruh anak-anak. Hal ini terjadi tidak hanya di daerah-daerah perkotaan, melainkan juga di daerah pedesaan. Secara nyata dapat dicatat begitu banyak Sekolah/Madrasah yang ada di pelosok-pelosok desa sehingga meniscayakan adanya sistem administrasi yang handal. Tanpa administrasi yang baik, penyelenggaraan pendidikan di desa-desa tersebut tidak dapat melahirkan out put atau lulusan yang baik. Hal ini menunjukkan pentingnya kelengkapan administrasi sekolah. Guru PKn di SD/MI maupun di MTs./SMP yang ada di pelosok desa juga membutuhkan sistem kelengkapan administrasi yang baik. Apa yang menjadi kebutuhan mereka secara administratif sekolah seharusnya tersedia secara lebih memadai. Apabila mereka mengajarkan pendidikan kewarganegaraan dengan alat atau sarana seadanya, yang ada hanya sebuah buku pegangan untuk guru saja tanpa rencana pengajaran yang jelas. Maka menjadi sulit bagi guru untuk memenuhi tuntutan kurikulum dengan kondisi seperti itu. Idealnya secara administratif, siswa MTs. pun harus disediakan buku pegangan atau alat penunjang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang lain misalnya perpustakaan sekolah. Semakin tampak di sini peran administrasi sekolah untuk guru.

Secara fungsional, seorang guru juga dituntut untuk memiliki kelengkapan administrasi sendiri. Begitu pula dengan guru pendidikan kewarganegaraan.

Kurikulum untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengarahkan siswa MTs. agar memiliki kemampuan membaca, menyimak/mendengar, berbicara dan menulis. Maka seorang guru PKn harus memiliki administrasi sendiri yang menunjang orientasi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sesuai kurikulum di atas. Oleh sebab itu, secara administrasi guru Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki perencanaan program pengajaran PKn, buku pegangan yang menunjang pencapaian target kurikulum, daftar absensi dan nilai harian siswa dan lain sebagainya. Apabila guru PKn tidak memiliki administrasi secara lengkap. Perencanaan administrasi penting dibuat oleh seorang guru untuk menjajaki kemampuan anak didik secara terarah di samping sebagai acuan evaluasi. Penting disadari bahwa secara fungsional, guru harus menguasai berbagai bentuk administrasi, bukan hanya administrasi secara simbolik. Tetapi secara substansi mereka juga dituntut makna administrasi lebih jauh. Secara simbolik administrasi diwujudkan dalam bentuk benda-benda yang mendukung proses belajar mengajar, namun secara substansi peran administrasi guru pada hakikatnya adalah: *Pertama*: sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. *Kedua*: sebagai wakil masyarakat dalam artian dilingkungan sekolah, guru

menjadi anggota masyarakat, *ketiga*: guru adalah orang yang ahli di dalam mata pelajaran, *keempat*: sebagai penegak disiplin, *kelima*: sebagai pelaksana administrasi pendidikan, *keenam*: pemimpin generasi muda dan *ketujuh*; penerjemah kepada masyarakat, (M. Uzer Usman, 2001:12).

Fungsi dan peran ideal guru di atas menuntut kemampuan guru untuk menguasai administrasi guru dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, guru juga harus memiliki kemampuan berperan sesuai dengan hakikat peran seorang guru profesional. Dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan, seorang guru harus mampu mengambil inisiatif, mengarahkan dan menilai kegiatan-kegiatan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehingga terjadi proses transformasi ilmu secara wajar dan baik antara guru dan anak didik.

Kenyataannya memang harus dipisahkan secara kualitas antara guru yang mengajar di MTs. Swasta dan MTs. Negeri. MTs. swasta harus diakui memang tidak 'semanja' MTs. Negeri karena MTs. Swasta hanya mengandalkan penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Sementara SD negeri adalah sebuah lembaga pendidikan untuk tingkat dasar, namun seluruh sarana dan prasarana, administrasi, tenaga guru dan lain sebagainya di tanggung oleh pemerintah. Anggapan awal penulis terhadap hal ini adalah bahwa pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang pendidikan dengan memberikan tenaga guru terutama guru pendidikan kewarganegaraan yang handal.

Latar belakang pemikiran diatas memiliki daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang peranan kelengkapan administrasi guru dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tertama di MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun Pelajaran 2019-2020.

Berdasarkan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah Peranan Kelengkapan Administrasi Guru dalam Pembelajaran PKn pada siswa Kelas VIII MTs. Al-Kautsar desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun Pelajaran 2019-2020.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Administrasi Guru

Secara etimologis dapat dijelaskan bahwa istilah administrasi merupakan bentukan akar kata dalam bahasa Yunani, *ad* dan *ministrare* (suatu kata kerja) yang berarti melayani, membantu atau memenuhi, (A.Gozali, dkk, 1993:7) atau dalam kamus besar bahasa Inggris dikatakan administer yang berarti mengurus, mengelola, menjalankan, melakukan, melaksanakan, memberikan, (Hasan Sadli, 2000:12).

Secara sempit administrasi seringkali sebagai tata usaha (*clerical work atau secretarial work*), yaitu keseluruhan kegiatan mencatat segala kejadian bagi keperluan pimpinan suatu organisasi. Pengertian sempit itu berasal dari "*Administratie*", sebuah konsepsi Belanda. Sedangkan dalam arti luas administrasi termasuk di dalamnya adalah tata usaha.

The Ling Gie, dkk, antara lain mengartikan administrasi sebagai segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu, (Gie dalam A.Gozali, 1993:7).

Hervert A. Simon dalam bukunya Public Administrastion yang mengartikan administrasi sebagai "*The activities of groups cooperating to acomplish common goals*", yaitu keseluruhan kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tentuntu, (Simon dalam A.Gozali, 1993:8).

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi dalam arti yang luas meliputi: (1) Segenap rangkaian perbuatan atau kegiatan, (2) Melibatkan orang atau sejumlah orang. (3) Adanya unsur kerjasama kalau lebih dari seorang. (4) Adanya tujuan tertentu secara terarah, (A.Gozali, 1993:7).

Apabila kata administrasi di atas dirangkai dengan kata guru yaitu administrasi guru akan memiliki arti yaitu keseluruhan rangkaian atau kegiatan seorang guru dengan tujuan tertentu. Lebih jauh definisi tersebut dapat dikembangkan menjadi keseluruhan kegiatan seorang guru dengan tujuan memberikan pelayanan, bantuan dan pengelolaan pendidikan untuk keberhasilan pengajaran. Berarti maksud administrasi guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah keseluruhan kegiatan guru yang bertujuan membantu, mengelola, mengurus dan melayani anak didik dalam proses belajar mengajar kemampuan berPendidikan Kewarganegaraan.

2. Peranan Administrasi Guru

Muh. Uzer Usman dalam bukunya menjadi guru profesional menjelaskan beberapa peran guru berkaitan dengan administrasi guru yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengambilan inisiatif, pengarah, dan penelitian kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya.
- (2) wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik.
- (3) orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan.
- (4) penegak disiplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin.
- (5) pelaksanaan administrasi pendidikan, disamping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi.
- (6) pemimpin generasi muda, masa depan generasi muda terletak ditangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa.
- (7) penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berpesan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada

masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan, (Muh.Uzer Usman, 2000:12).

Di bagian awal tulisan ini dijelaskan bahwa guru adalah salah satu komponen dari sistem sekolah. Dikatakan komponen sistem sekolah karena guru memiliki peran strategis sebagai sebuah komponen dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah yang harus paling berkaitan dan mempengaruhi secara bersama-sama dengan komponen lain untuk mencapai tujuan (tujuan pendidikan).

Komponen lain dalam sistem sekolah adalah sarana dan prasarana, tenaga guru, program dan administrasi diperlukan dalam proses belajar mengajar atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang secara sistematis ilmu pendidikan disebut sebagai instrumental input (masukan instrumental). (Umar T, 2000:60).

Pengetahuan tentang komponen-komponen pendidikan di atas juga harus dikuasai oleh seorang guru termasuk guru pendidikan kewarganegaraan. Sistem manajemen yang baik, termasuk pula dalam kemampuan pengelolaan kelas mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru termasuk guru Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Program Pengajaran

Program pengajaran terdiri dari tujuan kelas, jatah waktu, dan pembelajaran.

a. Tujuan kelas

Tujuan kelas diuraikan terpisah untuk setiap jenjang kelas. Tujuan kelas merupakan tujuan/keterampilan minimal yang harus dicapai/dimiliki peserta didik dalam satu jenjang kelas tertentu. Tujuan kelas merupakan penjabaran dari tujuan umum. Tujuan kelas secara bertahap akan dicapai melalui tiap pertemuan KBM. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran khusus untuk program satuan pelajaran dan persiapan mengajar dijabarkan dari tujuan kelas dengan memperhatikan butir-butir pembelajaran dan tujuan khusus komponen ke bahasa, pemahaman, atau penggunaan.

b. Jatah Waktu

Jatah Waktu dalam GBPP ini tidak disajikan secara rinci untuk setiap butir pembelajaran. Jatah waktu disajikan secara global untuk setiap cawu. Pembagian jatah waktu demikian dengan harapan agar para guru lebih luwes mengatur dan menggunakan waktu sesuai dengan keleluasan dan kedalaman materi, kemampuan peserta didik, dan jenis kegiatan yang direncanakan. Hal ini disebabkan banyaknya komponen yang berpengaruh dalam pelaksanaan KBM, sehingga penggunaan waktu bisa berbeda-beda untuk kegiatan yang sama jika dilaksanakan di tempat yang berbeda.

c. Pembelajaran

Mengapa pembelajaran penggunaan kata pembelajaran menunjukkan orientasi KBM adalah bagaimana peserta didik belajar

dan berlatih yang sekaligus mencerminkan bagaimana guru membimbing, melatih dan mengajar. Sejalan dengan hal tersebut maka pembelajaran disajikan dalam butir-butir pembelajaran yang selalu diawali dengan kata kerja yang menunjukkan kegiatan apa yang dilakukan oleh setiap peserta didik agar terampil berbahasa. Butir pembelajaran tidak disajikan dengan nomor urut karena apa yang disajikan dalam GBPP memang bukan merupakan kegiatan minimal yang disarankan yang di dalamnya mengandung pula bahan. Bila dianggap perlu boleh ditambah. Untuk kepentingan KBM beberapa butir pembelajaran dapat di gabungkan menjadi satu unit pelajaran yang dapat disajikan dalam beberapakali pertemuan.

4. Konsep Dasar Pengajaran PKn

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada pancasila dan kanstitusi negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang negara kasatuan Republic Indonesia. Secara histories, negara Indonesia telah diciptakan sebagai negara kesatuan dengan bentuk republik.

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempetahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan moderen. Negara kebangsaan moderen adalah adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Hal tersebut sesuai dengan risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Jakarta: Sekretariat Negara Republiki Indonesia, 1998. (Depdiknas, 2004:1).

Negara Kesatuan Republiki Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut juga dijumpai pada pembukaan undang-undang negara Republik Indonesia 1945.

Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjelaskan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi- organisasi non pemerintahan perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Sesungguhnya kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan bekal kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran PPKn (sekarang kewarganegaraan) (*Citizenship*). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media masa, dan lembaga-lembaga lainnya dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab sekolah tersebut.

a. Pengertian Pembelajaran PPKn

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengalami perubahan nama seperti yang dijelaskan oleh seorang ahli di bawah ini: Di samping istilah warga negara juga dikenal istilah kewarganegaraan. Apa kewarganegaraan itu? Kewarganegaraan memiliki pengertian lebih luas dari warga negara. Kewarganegaraan memiliki pengertian tidak terbatas keanggotaan dari organisasi negara, tetapi meluas kepada hal-hal yang terkait dengan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian kewarganegaraan dapat dilihat dari perspektif ide kewarganegaraan dan prinsip warga negara sebagai subjek politik, (Masri Muhammad, 1998).

PPKn (sekarang Pendidikan Kewarganegaraan) (*citizenship*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembantuan diri yang beragam dari segi agama, sosial-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, tampan dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 hal tersebut

tercermin pada ruang lingkup materi dalam pengajaran PPKn di bawah ini:

- (2) Persatuan bangsa
- (3) Norma, hukum dan peraturan
- (4) Hak asasi manusia
- (5) Kebutuhan hidup
- (6) Kekuasaan dan politik
- (7) Masyarakat demokratis
- (8) Pancasila dan knstitusi Negara
- (9) Globalisasi, (Depdiknas, 2004:2).

b. Tujuan Pembelajaran PKn

Tujuan mata pelajaran kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

- a) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi, (Depdiknas, 2004:1).

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Diskriptif Kualitatif. Penulis memilih diskriptif Kualitatif ini agar dapat memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok pembahasan yang harus diketemukan jawabannya dalam penelitian ini.

Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2001:3), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dengan metode ini, penelitian bermaksud untuk mengkaji secara mendalam tentang Pengaruh Lingkungan Masyarakat terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun Pelajaran 2019-2020.

Ridwan menjelaskan bahwa ada dua macam penelitian yaitu, pertama; penelitian eksperimen yaitu segala yang diteliti itu ditimbulkan dengan sengaja, dan kedua; penelitian *eks post facto* yaitu apabila gejala yang diteliti itu ditimbulkan secara wajar, (1996:14).

Hal ini diperkuat dengan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa eksperimen selalu dilakukan dengan sengaja

menimbulkan gejala yang diteliti. Sedangkan penelitian *eks post facto* hanya meneliti apa yang telah ada, (1993:56).

Sehubungan dengan itu akan dilakukan jenis penelitian *eks post facto* karena objek penelitian sudah ada dan timbul secara wajar, artinya penulis tidak memperlakukan lagi subjek penelitian untuk menimbulkan gejala yang diinginkan. Dalam hubungannya dengan kelengkapan administrasi guru, maka penelitian ini dirancang dengan menjadikan pembelajaran PKn siswa kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu sebagai objek penelitian. Kelengkapan administrasi guru yang telah ada akan diteliti apa adanya dengan pendekatan penelitian *eks post facto* (*eks post facto approach*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan seseorang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat, (Usman, 1996:5). Karena penelitian ini mengambil lokasi di suatu tempat yaitu di MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun Pelajaran 2019-2020 maka penelitian ini dapatlah digolongkan dalam jenis penelitian lapangan..

D. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Data Hasil Kokumenter

Berdasarkan hasil dokumenter berkaitan dengan kelengkapan dengan administrasi guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, maka hasil dokumenter dapat diuraikan sebagai berikut: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara umum terdiri atas tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan pengajaran dan tatap evaluasi. Ketiga tahapan ini merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Peranan kelengkapan administrasi guru dalam pembelajaran Kewarganegaraan siswa kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu akan dibahas pada setiap tahap pembelajarannya sesuai dengan data dan analisis data di atas.

2. Persiapan Pembelajaran

Administrasi guru yang dibutuhkan pada tahapan ini meliputi kurikulum/GBPP, analisis materi pembelajaran (AMP), program tahunan dan catur wulan, program satuan pembelajaran, rencana pembelajaran, lembar kerja siswa, daftar nilai, buku tatap muka/prestasi siswa, buku sumber dan buku pelengkap, program perbaikan, buku kumpulan tugas/soal dan kalender pendidikan.

Pada tahapan ini, administrasi guru berperan sebagai bagian dari perencanaan pengajaran. Kelengkapan administrasi guru memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengarah untuk mencapai tujuan pembelajaran umum (TPU) dan tujuan instruksional khusus (TIK). Perangkat pengajaran seperti kurikulum. Program semester dan

tahunan, analisis materi pembelajaran dan rencana pembelajaran dibuat pada tahapan ini.

Berdasarkan data dan analisis data yang telah disajikan di atas menunjukkan bahwa pada tahap persiapan pengajaran, hampir semua objek penelitian yang dalam hal ini guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang telah memiliki administrasi yang lengkap. Kondisi ini sangat memungkinkan karena pada setiap pertemuan guru-guru MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu terjadi komunikasi yang aktif terutama diantara guru-guru kelas VII. Pertemuan ini biasanya digunakan sebagai wahana tukar pendapat diantara mereka sehingga untuk keseragaman pembelajaran umumnya mereka memiliki perangkat yang hampir sama. Hal ini dimaksudkan untuk menyeragamkan kelakuan mereka pada tahap pembelajaran yang lain sehingga diharapkan output yang dihasilkan hampir sama.

3. Pelaksanaan Pembelajaran

Tahap ini merupakan cerminan dari pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat pada tahap persiapan. Administrasi guru yang dibutuhkan pada tahap ini meliputi rencana pembelajaran, buku tatap muka, buku sumber dan pelengkap, buku kumpulan tugas/soal. Rencana pembelajaran memiliki peranan dalam menentukan pokok bahasan dan sub pokok bahasan, metode, alokasi waktu dan tahapan kegiatan. Umumnya pada tahap ini guru melakukan apersepsi, motivasi, pra test, penyajian materi, menyimpulkan, post tes dan pemberian tugas. Pelaksanaan pengajaran akan dilakukan dengan baik apabila guru mampu membuat rencana pembelajaran dengan baik dan dapat melaksanakannya sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga rencana pembelajaran harus dapat dibuat konstruktif dan profesional.

Dari data dan analisis data diatas menunjukan bahwa administrasi guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk pelaksanaan pengajaran di MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu lengkap sekali, hanya MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang tidak memiliki kelengkapan administrasi yang baik.

4. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi merupakan bagian terakhir dari tahapan pembelajaran. Tahap ini berperan sebagai untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengajaran. Evaluasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok tergantung pada tujuan evaluasi, cara evaluasi, waktu evaluasi, dan ruang lingkup evaluasi. Tetapi secara umum evaluasi dalam kegiatan pembelajaran meliputi Pre test, post test, permatif, sub sumatif, sumatif, kurikulum dan ekstra kurikulum.

Dari data di atas menunjukkan bahwa administrasi guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu pada umumnya sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru tersebut telah memiliki alat evaluasi

yang baik sehingga memungkinkan bagi mereka untuk bisa mengukur keberhasilan pembelajaran di sekolah masing-masing.

5. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi dan hasil angket yang disebarkan kepada subjek penelitian maka didapatkan hasil tentang peranan kelengkapan administrasi guru dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu sebagai berikut:

- a. Bagi pencapaian tujuan pendidikan
 - 1) Sebagai jembatan bagi pencapaian tujuan pendidikan
 - 2) Pengambilan kebijakan, inisiatif, pengarah, dan penilain kegiatan-kegiatan pendidikan
 - 3) Sebagai pedoman pelaksanaan program selanjutnya
- b. Bagi Siswa (Peserta Didik)
 - 1) Anak dapat mengetahui apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka miliki untuk meraih esok.
 - 2) Dapat mengukur potensi dirinya untuk mengadakan pilihan terhadap berbagai pengetahuan, khususnya dalam keterampilan berbahasa.
 - 3) Dapat menyiapkan diri secara lebih baik, dan teratur dalam menerima pelajaran
 - 4) Peserta didik mudah menerima dan memahami, karena materi pembelajaran yang diberikan secara sistematis.
- c. Bagi Guru
 - 1) Dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan, pengalaman belajar serta kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik.
 - 2) Dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan PBM.
 - 3) Dapat mengorganisir dan mengembangkan tugasnya bagi keberhasilan peserta didik
 - 4) Dapat berfungsi sebagai alat monitoring dan pengawasan serta penilaian bagi tuntutan dan kemajuan peserta didik.
 - 5) Dapat mengajukan berbagai koreksi atau usulan perbaikan yang sangat diharapkan yang bertolak belakang dengan keadaan nyata dilapangan
 - 6) Dapat mengetahui apa yang telah dibuat bahkan dapat mengungkapkan sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam tugasnya dapat mengetahui:
 - (1) Tujuan-tujuan yang ingin dicapai
 - (2) Pengetahun pengalaman-pengalaman belajar serta aktifitas-aktifitas tertentu
 - (3) Jenis-jenis program disekolah atau lembaga
 - (4) bagaimana melaksanakan suatu program
 - (5) Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program pembelajaran atau kegiatan-kegiatan lainnya
 - (6) Media dan fasilitas serta perlengkapan apa yang dibutuhkan

- (7) Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dan bagaimana menghadapi permasalahan tersebut
- (8) Bagaimana pengembangan lebih lanjut berkaitan dengan administrasi guru.
- d. Bagi Kepala Sekolah/Pembina
 - 1) Sebagai pedoman dalam memimpin, melaksanakan (periksa pedoman guru)
 - 2) Sebagai pedoman dalam supervisi terutama dalam memperbaiki situasi belajar
 - 3) Sebagai pedoman dalam menyiapkan situasi belajar yang baik agar anak dapat belajar secara maksimal
 - 4) Sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi kemajuan belajar maupun proses pembelajaran
 - 5) Sebagai pedoman dalam membantu guru dalam kesulitan PBM
 - 6) Sebagai pedoman dalam mengembangkan program selanjutnya
- e. Bagi Sekolah pada tingkat atasnya
 - 1) Sebagai alat keseimbangan proses pendidikan:
 - (1) Apa yang telah diajarkan
 - (2) Apa yang belum diajarkan
 - (3) Kajian untuk menentukan program bagi sekolah di atasnya
 - 2) Sebagai kontinuitas pendidikan:
 - (1) Apa yang diberikan pada sekolah di atasnya
 - (2) Apa yang perlu dimantapkan
 - (3) Apa yang harus dikembangkan dan di perluas
 - (4) Pendekatan-pendekatan apa yang dapat digunakan bagi sekolah di atasnya.

E. Kesimpulan

Setelah membahas tentang peranan kelengkapan administrasi guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII MTs. MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kabupaten Dompu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Guru dalam mengajar Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu telah menyiapkan perangkat (administrasi) pengajaran sehingga hal tersebut memungkinkan untuk berperang dalam proses belajar mengajar.
2. Peranan kelengkapan administrasi guru dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan MTs. Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu benar-benar mempunyai peranan penting bagi guru dan siswa, sehingga output lebih baik.

Daftar Rujukan

- Abu Ahmadi, dkk, 1991, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, Mas Agung, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdikbud, 1990. GBPP Pendidikan Kewarganegaraan SLTP. Jakarta
- Depdiknas. 2003. *Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Depdiknas, 2004, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata PKn*, Depdiknas, Jakarta.
- Gozali, A. Dkk. 1993. *Administrasi Sekolah*. Jakarta: Pepara
- Hadi, Sutrisno. 1990. *bimbingan menulis karya ilmiah*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Komaruddin, 1997, *Metode Penelitian*, Angkasa, Bandung.
- Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi. 2004. *Paradigma pendidikan universal di era modern dan post modern*. Yogyakarta: ircisod.
- Mardalis, 1999. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, 1996. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan FE Unifersitas Islam Indonesia.
- Masri Muhammad, 1998, *Pelajaran PKn Untuk SMP/Sederajat*, Depdikbud, Jakarta.
- Mastur, dkk 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, STAI Al-Amin Dompur. NTB.
- Margono, 1996. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Pen. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pen. Remaja Rosda Karya Bandung.
- Moh Ali, 1997, *Penelitian Kependidikan*, Angkasa, Bandung.
- Netra, Ida Bagus. 1974. *Statistik Imprensial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sadli, Hasan. 2000. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan bahasa. 1997. *Kamus Besar Pendidikan Kewarganegaraan Ed. 2*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tirtaraharja, Umar dan Sula, La. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- T. Raka Joni, 1994, *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*, Karya Anda Surabaya.
- Toeti Rizal, 2004, *Pengetahuan Sosial*, Depdikbud, Jakarta.
- Usman, Uzer, M. 2001. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakary.